

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAIMIN
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 840299

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 230.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 449 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000

1. MOTOR, HONDA GL PRO II Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA HONDA ASTREA GREN Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.950.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.141.284**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 253.091.284

III. HUTANG Rp. 115.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 138.091.284

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.